



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021, merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan selain sebagai bahan pelaporan juga berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan rutin/kepegawaian maupun kegiatan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangkah waktu yang berjalan.

Kami sungguh sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 ini banyak kelemahan baik itu berupa pendataan (Asumsi) maupun perhitungan-perhitungannya. Setiap masukan dan kritik yang ada sangat kami harapkan.

Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Waikabubak, 10 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat



HERYBERTUS NDAMA NGGILIK,ST

Pembina –IV/a

NIP. 19780424 200604 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja PD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu instrument yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun. Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021.

B. Kedudukan dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, selalu berpatokan pada aturan yang ada sesuai dengan Perda Nomor : 30 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan Institusi yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

2. Tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

3. Tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

4. Tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.

5. Tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah seperti disebutkan diatas secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dengan 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal dan Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pengawasan;
5. Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Non Perijinan;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang dengan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dan Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok masing-masing jabatan struktural yang ada **terlampir**.

D. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebanyak 19 orang dan Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 13 orang. Lebih rinci tentang keadaan sumber daya manusia yang ada pada dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1.1.1 Komposisi Pegawai dan Kompetensi Pegawai

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
I	Jabatan Struktur			1
	1. Kepala Dinas	1		1
	2. Sekretaris	1		1
	3. Kepala Bidang	4		4
	4. Kepala Sub Bagian	1	2	3
	5. Kepala Seksi Bidang	2	6	8
II	Jabatan Fungsional	-	-	-
III	Pelaksana	2		2
JUMLAH		10	9	19

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan mencapai 90 % dan pelaksana 10 %

berjenis kelamin Laki 55% dan Perempuan 45% di ruang lingkup kantor DPMPTSP. Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan sedang daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3. Terdapat kekosongan jabatan pada tahun selanjutnya dikarenakan adanya pegawai yang telah pensiun

Tabel 1.2

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN**

GOL	Sekretariat		Bid. Periz.		Bid. Penga.		Bid. Promosi		Bid. Penge		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a													
II/b	2										2		2
II/c													
II/d													
III/a													
III/b										1		1	1
III/c	1	2			2			1		1	1	6	7
III/d				2				1				3	3
IV/a	1		1		1		1		1		5		5
IV/b	1										1		1
IV/c													
Total	4	3	1	2	3		1	2	1	2	9	10	19

Tabel 1.3.

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekreta.		Bidang Perijin		Bidang Pengad.		Bidang Promo		Bidang Penge.		Jumlah		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L/P	
SMA/ SMK	3			1	1							4	1	5
D/III				1				1					2	2
S1	2	2	1	1	2		1	1	1	1	7	5	12	
S2														
Total	5	2	1	3	3		1	2	1	2	11	8	19	

Disamping itu, jumlah PNS di bandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi masih kurang sehingga masih memerlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, telah mengikut sertakan staf untuk mengikuti diklat fungsional yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

1.1.1. Sarana Prasarana

Ketersediaan Sumber Daya Manusia perlu didukung dengan sarana prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi.

Tabel 5 Data Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah (buah)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	150	126	5	19
2.	Alat Studio dan Komunikasi	3	2	-	1
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3	1	1	1
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	10	4	3	3
5.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah *“Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang prima”*.

Penjelasan Makna Visi

Berdaya Saing : mengandung makna persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Berkelanjutan : mengandung makna bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan.

Berwawasan Lingkungan : mengandung makna peningkatan investasi yang berdaya saing dan berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbasis pada Sumber Daya Daerah : mengandung makna peningkatan investasi di Kulon Progo dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah.

Pelayanan Perizinan Prima : mengandung makna bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya

kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat,transparan dan pasti

2. Pernyataan Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai visi adalah sebagai berikut :

1. *Mewujudkan peningkatan daya saing daerah;*
2. *Mewujudkan pelayanan prima perizinan.*

Penjelasan Makna Misi

1. Misi Pertama mengandung maksud peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana/infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan.

Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perijinan diperlukan untuk mendukung meningkatnya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan penanaman modal;

2. Misi Kedua mengandung maksud peningkatan investasi perlu didukung dengan pelayanan prima dalam bidang perijinan. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi /kebijakan yang jelas di bidang perijinan, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujudnya pelayanan prima.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dipresentasikan untuk mendapatkan hasil perencanaan potensi investasi yang maksimal;
2. Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan secara konsisten sesuai jenjang struktur yang ada;
3. Adanya dukungan dana yang memadai dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Adanya dukungan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
5. Adanya koordinasi dan kerjasama antara sektor terkait.

4. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan peningkatan saing daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah	1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat
Mewujudkan pelayanan prima perijinan	Terwujudnya pelayanan prima perijinan;	1. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu 2. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perijinan

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.

Pada Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Kebijakan dan Program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : *“Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah”.*

Sasaran	Program
1. Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat	

Tujuan 2 : *“Terwujudnya pelayanan prima perijinan”.*

Sasaran	Program
1. Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu	1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Penyelesaian pengaduan terhadap masalah-masalah perijinan	2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Rencana kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subjektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk patok duga kemampuan pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya realisasi investasi”

No.	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	2	3
1.	Terciptanya iklim usaha kondusif bagi pelaksanaan kegiatan PMDN/PMA	1 Paket
2.	Terciptanya kemitraan investasi antar pengusaha, pemerintah dan usaha kecil menengah	1 Paket
3.	Terciptanya pengawasan investasi yang baik	1 paket

Sasaran 2 : “Peningkatan Promosi Potensi Investasi Kabupaten

Sumba Barat”

No.	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	2	3
1.	Tersedianya bahan promosi potensi investasi daerah	1 Paket

Sasaran 3 : “Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu”

No.	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	2	3
1.	Ketepatan waktu pelayanan perijinan dan prosentase kepastian dan ketepatan bagi pengembangan usaha	1 Paket

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN -Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS -Penyediaan Administrasi Keuangan	19 orang 13 orang 2 orang	1.398.716.160 249.154.048 9.998.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor -Terpebutuhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor -Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan -Tersedianya Alat Tulis Kantor	15 Jenis 4 jenis 20500 lembar 40 jenis	2.497.400 74.925.100 10.000.000 15.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya dan listrik -Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor -Tersedianya Makan, Minum Rapat dan Harian Pegawai -Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	30 kali 4 unit 2072 OH 20 Jenis	18.600.000 4.000.000 14.400.000 5.599.200

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional -Terpeliharanya Bangunan Gedung/Kantor	10 unit 1 unit	34.995.000 4.189.100
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			416.198.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Terlaksannya Identifikasi dan Legalisasi Lahan Potensi Investasi	1 Dokumen	68.300.000
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-Tersedianya Dokumen Rencana Umum PM Kabupaten Sumba Barat	1 Dokumen	197.898.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	-Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten Sumba Barat	1 Dokumen	150.000.000
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			66.500.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Kegiatan Promosi Investasi Daerah	2 jenis	65.500.000
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			863.115.700
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Terfasilitasinya Pelayanan Perijinan dalam rangka Pengembangan Usaha -Terlaksananya Rapat Koordinasi Keluar Daerah -Terlaksananya BIMTEK/Sosialisasi Kemudahan Berusaha -Tersedianya SP,SOP, dan regulasi serta Sosialisasi Bidang PMPTSP	500 ijin dan 5 orang 8 kegiatan dan 20 Dokumen	253.604.900 221.995.000 387.515.800

5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			256.850.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Terlaksananya Pemantauan Kepada Pelaku Usaha	7 kali	91.100.000
		-Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 pelaku usaha	45.200.000
		-Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 pelaku usaha	120.550.000
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			66.869.900
	Pengolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang berintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	1 data	66.869.900

BAB III.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam menentukan keberhasilan dalam hal ketersediaan dana yang cukup dan kualitas tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan serta kemauan yang baik dari semua pihak khususnya dari masyarakat dalam menghadapi perubahan dunia kerja (technology Information), mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah di tetapkan sebagai Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan.

Dengan di tetapkannya ke 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan tersebut pelaksanaan kegiatan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan hasil yang baik dalam membangun Kabupaten Sumba Barat dan disadari bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih terdapat kekurangan dan kendala dengan sumber daya yang ada, dengan kekurangan dan kendala yang ada menjadi motifasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus melakukan Tugas dan Fungsi dan Melayani Masyarakat dengan baik.

2. SARAN

Rencana Kerja Tahunan ini kiranya menjadi hal yang sangat penting yang perlu di perhatikan bersama dalam penganggaran Dana dan tenaga IT (Information Tecnoligi) dalam menghadapi perubahan Zaman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga Program Kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dalam seluruh pelayanan dan pengabdian kita untuk mewujudkan kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, adil, aman dan sejahtera serta demokratis dan berbudaya hukum.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat,



HERYBERTUS NDAMA NGGILIK,ST

Pembina - IV/a

NIP. 19780424 200604 1 012